

LAPORAN PENELITIAN



**STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Oleh:

DAMAR WIBISONO, S.Sos., M.A. (Ketua)
Drs. SUWARNO, M.H. (Anggota)
Drs. ABDUL SYANI, M.I.P. (Anggota)
Drs. PAIRULSYAH, M.H. (Anggota)
FUAD ABDULGANI, S.Sos., M.A. (Anggota)

**Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Universitas Lampung
Dengan Nomor Kontrak: 502/UN26.16/KU.02.00.01/2018**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Bidang Penelitian : Sosiologi
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 198503152014041002
 - d. Disiplin Ilmu : Sosiologi
 - e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/ III b
 - f. Jabatan : Asisten Ahli
 - g. Fakultas/Jurusan : ISIP/ Sosiologi
 - h. Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung 35145
 - i. Telp/Faks/E-mail : (0721) 704626
 - j. Telp. Kantor : (0721) 704626
 - k. HP/Email : 085369037666/ damar.wibisono@yahoo.co.id
4. Jumlah Anggota : 4 orang
 1. Drs. Suwarno, M.H./ 0016066516
 2. Drs. Abdul Syani, M.I.P./ 0004075705
 3. Drs. Pairulsyah, M.H./ 0012106304
 4. Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A. / 231801870116101
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Tulang Bawang Barat
6. Biaya yang diusulkan : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Drs. Ikram, M.Si.
NIP 196106021989021001

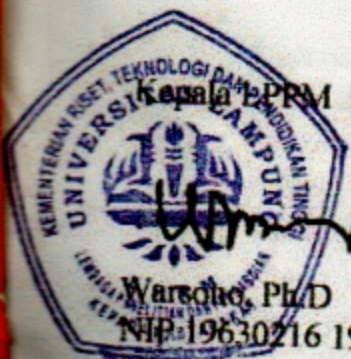
Bandar Lampung, 20 Agustus 2018

Ketua Peneliti,

Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP 198503152014041002

Menyetujui,

Kapala PPM Universitas Lampung,



Wardana, Ph.D
NIP: 19630216 1987031003

Dekan,



Dr. Syarif Makhya
NIP: 195908031986031003

UNIVERSITAS LAMPUNG	
16-12-2021	
JENIS	/UM26/B / Lppm/2021
PARAF	Penelitian
	81

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	BidangKeahlian	Program Studi	AlokasiWaktu (jam/minggu)
1.	Damar Wibisono, S.Sos., M.A.	Ketua	Kebijakan sosial	Sosiologi	20 jam/minggu
2.	Drs. Suwarno, M.H.	Anggota 1	Pemetaan Sosial	Sosiologi	10 jam/minggu
3.	Drs. Abdul Syani. M.I.P.	Anggota 2	Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal	Sosiologi	10 jam/minggu
4.	Drs. Pairulsyah, M.H.	Anggota 3	Kearifan Lokal	Sosiologi	10 jam/minggu
5.	Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A.	Anggota 4	Kesejahteraan Sosial	Sosiologi	10 jam/minggu

3. Objek Penelitian:

Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

4. Masa Pelaksanaan:

Mulai : bulan Mei tahun 2018

Berakhir : bulan Agustus tahun 2018

5. Usulan Biaya : Rp. 10.000.000,-

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): Kabupaten Tulang Bawang Barat

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya):

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai instansi mitra berkontribusi dalam mendukung kegiatan penelitian dan diharapkan bisa menerapkan strategi penangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Penelitian tentang strategi penangan kemiskinan masih sangat jarang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi strategis dalam upaya kemiskinan di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Lampung pada Umumnya.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi):

Jurnal Komunitas (ISSN 2086-5465) Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS UNNES, website: <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>. Rencana publikasi jurnal tahun 2019.

RINGKASAN

Masalah kemiskinan menjadi masalah klasik yang perlu dicari jalan keluarnya. Telah banyak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, swasta, LSM, dan komponen masyarakat lainnya. Namun pada kenyataannya masalah tersebut belum terselesaikan hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih mengalami permasalahan mendasar dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah ditempuh selama ini masih belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Secara universal, aspek kemanusiaan merupakan alasan utama untuk merumuskan kembali dan menata program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dalam memenuhi hak asasi manusia untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Untuk itu, kerjasama semua pihak baik itu pemerintah, swasta, LSM, dan perguruan tinggi menjadi aspek utama dalam upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Barat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tentang strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif analisis. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terdapat di seputar fokus penelitian dengan diikuti analisis-*analisis* dengan tujuan untuk melakukan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan dari fenomena-fenomena yang terjadi. Sehingga hasil studi deskriptif analisis ini dapat dilakukan kajian, menyusun visi, misi, kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengatasi masalah kemiskinan antara lain: strategi pemenuhan kebutuhan dasar, Strategi memperbaiki program perlindungan sosial, strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, strategi pembangunan inklusif, strategi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, dan strategi reorientasi kebijakan. Sementara untuk skenario dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara kebijakan penganggaran, kebijakan integrasi perencanaan, kebijakan penguatan kelembagaan TKPK, kebijakan rencana aksi pemenuhan hak dasar, mekanisme pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi, pelembagaan rencana aksi, jaringan kerja pelaksanaan rencana aksi, penganggaran rencana aksi, optimalisasi peluang dana sosial lainnya, dan mengantisipasi hambatan-hambatan rencana aksi

Kata Kunci: *Strategi, Penangan Kemiskinan, Kabupaten Lampung Barat*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmad dan karunia-Nya, maka laporan hasil penelitian yang berjudul “Strategi Penangan Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat”, ini dapat diselesaikan.

Meskipun demikian, kami juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sebagai akibat keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kritik, koreksi dan masukan yang kondusif sangat diharapkan untuk menyempurnakannya.

Sehubungan dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian ini berlangsung, baik sejak proses penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian maupun saat penyusunan laporan hasil penelitian. Semoga semuanya bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Ketua Peneliti,



Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP 198503152014041002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Urgensi Penelitian	10
E. Temuan dan Luaran yang Ditargetkan serta Kontribusinya pada Keilmuan Unggulan PT	10
F. Rencana Capaian Target	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Strategi	12
B. Konsep dan Dimensi Kemiskinan	12
C. Perspektif Kemiskinan	15
D. Implementasi Adat Budaya	12
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Pendekatan Penelitian	18
B. Lokasi dan Fokus Penelitian	18
C. Jenis dan Sumber Data	18
D. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Teknik Pengolahan Data	19
F. Analisis Data	19
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	21
A. Gambaran Umum Kelurahan Way Urang	21
B. Kependudukan	21
C. Kesejahteraan	22
D. Pendidikan	22
E. Kesehatan	22
F. Ketenagakerjaan	23
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Kondisi Kemiskinan Daerah	25
B. Kedalaman Kemiskinan dan Keperahan Kemiskinan	26
C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	29
D. Skenario dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan	33
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	46
A. Simpulan	46
B. Saran	47
REFERENSI	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Target dan Capaian Tahunan.....	11
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas.....	24
Tabel 3. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015	27
Tabel 4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (p1) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009-2014	28
Tabel 5. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009-2014.....	29

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan menjadi masalah klasik yang perlu dicari jalan keluarnya. Telah banyak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, swasta, LSM, dan komponen masyarakat lainnya. Namun pada kenyataannya masalah tersebut belum terselesaikan hingga saat ini.

Acuan dasar penanggulangan kemiskinan secara filosofi terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "*Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa*". Sementara dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa "Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta setiap orang berhak atas *jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*". Dengan demikian jelas bahwa Negara, yang mengandung arti luas seluruh pelaku dan bukan hanya Pemerintah Daerah, termasuk Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan mandat untuk turut serta menanggulangi masalah kemiskinan.

Namun demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih sering dipandang sebagai domain urusan pemerintah saja. Uniknya, perspektif tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja, namun juga datang dari kalangan aparat pemerintahan sendiri. Konsekuensinya, keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih kecil.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih mengalami permasalahan mendasar dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah ditempuh selama ini masih belum optimal dalam menurunkan angka

kemiskinan. Secara universal, aspek kemanusiaan merupakan alasan utama untuk merumuskan kembali dan menata program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dalam memenuhi hak asasi manusia untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang hidup di bawah garis kemiskinan hingga Desember 2016 mencapai 18.112 jiwa atau 6,78 persen dari total jumlah penduduk daerah itu. Dibandingkan pada Desember 2015, angka tersebut meningkat, penduduk yang miskin ini sebagian besar bergerak di sektor pertanian.

Data Dinas Sosial (Dissos) Tubaba dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, periode Desember 2015 jumlah penduduk miskin 16.313 jiwa atau 6,11 persen dari jumlah penduduk 266.973 jiwa. Jika dibanding Desember 2016, jumlah penduduk miskin ini meningkat 1.799 jiwa.

Kondisi demikian tak lepas dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan selama ini. Namun perlu disadari bahwa dinamika sosial politik yang berlangsung cepat, seiring dengan efek globalisasi yang luas telah menuntut Pemerintah Daerah untuk memperbaharui dan menyesuaikan strategi penanggulangan kemiskinan yang ditempuh dengan perkembangan aktual baik secara eksternal maupun internal yang terjadi. Di samping itu, belum tersedianya basis data yang terunifikasi sebagai bahan rujukan bersama juga menjadi kendala yang harus segera diatasi. Sementara itu, metode pendataan yang digunakan oleh masing-masing instansi selama ini tidak sama dan belum ada koordinasi antar pelaku sehingga sering terjadi tumpang-tindih program dan sasaran serta kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dukungan dan kerjasama semua pihak, bukan hanya dari pemerintah tapi juga diperlukan peran swasta, LSM dan perguruan tinggi. Beranjak dari kondisi tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang “Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat” sebagai upaya perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakan Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tentang strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

D. Urgensi Penelitian

Masalah kemiskinan menjadi masalah klasik yang perlu dicari jalan keluarnya. Telah banyak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, swasta, LSM, dan komponen masyarakat lainnya. Namun pada kenyataannya masalah tersebut belum terselesaikan hingga saat ini. Melihat kondisi tersebut, peran akademisi menjadi amat penting sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan. Untuk itu, penelitian tentang strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu segera dilaksanakan dan diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi.

E. Temuan dan Luaran Inovasi yang Ditargetkan serta Kontribusinya pada Keilmuan Unggulan PT

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan dan luaran inovasi berupa:

1. Strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Pengembangan model penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Jurnal Ilmiah tentang “Strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Hasil analisis akan di publikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi B, yaitu Jurnal Komunitas (ISSN 2086-5465) Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS UNNES, website:

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>. Rencana publikasi jurnal tahun 2019.

4. Makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah baik nasional ataupun internasional

F. Rencana Capaian Target

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. Adapun rencana target capaian sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan

No.	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Nasional Terakreditasi/ Internasional	<i>Submit/ Reviewed</i>
2	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Nasional/ Internasional	<i>Submit/ Reviewed</i>
3	Prosiding/Buku	-	Publikasi
4	Model	-	Produk/ Penerapan

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

Buzzel dan Gale sebagaimana dikutip oleh Panji Anoraga (2004) mendefinisikan strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumberdaya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.

Sementara strategi menurut Kenneth Andrew yang dikutip oleh Panji Anoraga (2004) adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan, serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu. Sementara, Basu Swasta dan Irawan (2005) menyatakan bahwa strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, maka maksud dari strategi penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan yang dilakukan secara rasional dalam penanggulangan kemiskinan dengan memperhitungkan pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan.

B. Konsep dan Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwujud wajah, bermatra multidimensional. Suharto (2014: 132) mengungkapkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar lainnya (pangan, sandang, dan papan)
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam

6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004: 1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsinten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Sementara BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan

atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Selain itu, Bank dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar Negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya sosial atau dana yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran pendapatan US \$1 perkapita per hari sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah US\$1 perkapita per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. Bank dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar Negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya sosial atau dana yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran pendapatan US \$1 perkapita per hari sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah US\$1 perkapita per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Konsep atau definisi kemiskinan yang digunakan di Indonesia sesuai dengan konsep Badan Pusat Statistik adalah Kemiskinan Absolut yaitu kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti Pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan Pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum/ kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut, mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari kebijakan penanggulangan kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu program terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit usaha kecil). Angka kemiskinan akan dapat dibandingkan antara satu negara dengan negara lain, jika garis kemiskinan absolut yang digunakan sama di negara yang dibandingkan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana masyarakat tidak terpenuhi hak-hak dasarnya baik sandang dan papan. Ada 14 standar kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik antara lain :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

C. Perspektif Kemiskinan

Menurut beberapa pakar kemiskinan, minimal ada tiga konsep kemiskinan yang sering digunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret dan lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat yaitu sandang, pangan dan papan.

Sementara, konsep kemiskinan relatif dirumuskan dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah bahwa kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan kemiskinan di daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan kemiskinan pada waktu yang lain. Tolok ukur yang digunakan didasarkan pada pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Sedangkan konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi bahwa kelompok yang menurut ukuran individu tertentu berada di bawah garis kemiskinan, namun bisa jadi mereka tidak menganggap dirinya miskin, dan demikian pula sebaliknya. Sementara kelompok yang dalam penilaian kita tergolong hidup layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri semacam itu, demikian pula sebaliknya.

Untuk mendekati masalah kemiskinan ini terdapat dua perspektif utama, yaitu perspektif kultural dan perspektif struktural/ situasional. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, yaitu individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat-sifat seperti: parochial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, dependent dan inferior (rendah diri). Sementara pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan fakta jumlah keluarga yang besar. Sedang pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat yang efektif. Kaum miskin sering kali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.

Sementara itu perspektif situasional melihat masalah kemiskinan sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain terwujud dalam program-program pembangunan yang terlalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata dan kurang memperhatikan pemerataan. Program pembangunan semacam ini hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang kaya karena dua hal, yaitu:

- a. Terkait dengan akumulasi modal, kelompok masyarakat kaya mendapat kesempatan lebih banyak untuk mendapat aset-aset tambahan

sehingga dapat lebih cepat berkembang.

- b. Terkait dengan fungsi lembaga khususnya lembaga ekonomi yang memang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kemajuan jaman, ternyata juga hanya kelompok kaya yang dapat menikmatinya.

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif analisis. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terdapat di seputar fokus penelitian dengan diikuti analisis-analisis dengan tujuan untuk melakukan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan dari fenomena-fenomena yang terjadi. Sehingga hasil studi deskriptif analisis ini dapat dilakukan kajian, menyusun visi, misi, kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena kabupaten tersebut merupakan satu dari tiga kabuapten termiskin yang ada di Provinsi Lampung dan memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah ketiga di Provinsi Lampung. Penelitian ini difokuskan pada strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dari berbagai sumber berupa data primer dan data sekunder. Data utama berupa fakta, informasi, dokumen-dokumen, dan opini atau pandangan dan harapan yang diperoleh dari institusi, organisasi dan individu, baik yang langsung maupun yang tidak langsung terlibat dalam situasi yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data utama menggunakan teknik wawancara mendalam, dan dokumentasi. *Pertama*, teknik wawancara mendalam bersifat terbuka dan dalam bentuk terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan dalam tujuan penelitian. *Kedua*, teknik dokumentasi

dimaksudkan untuk memperoleh sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen-dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, berita acara dan klipng.

E. Teknik Pengolahan Data

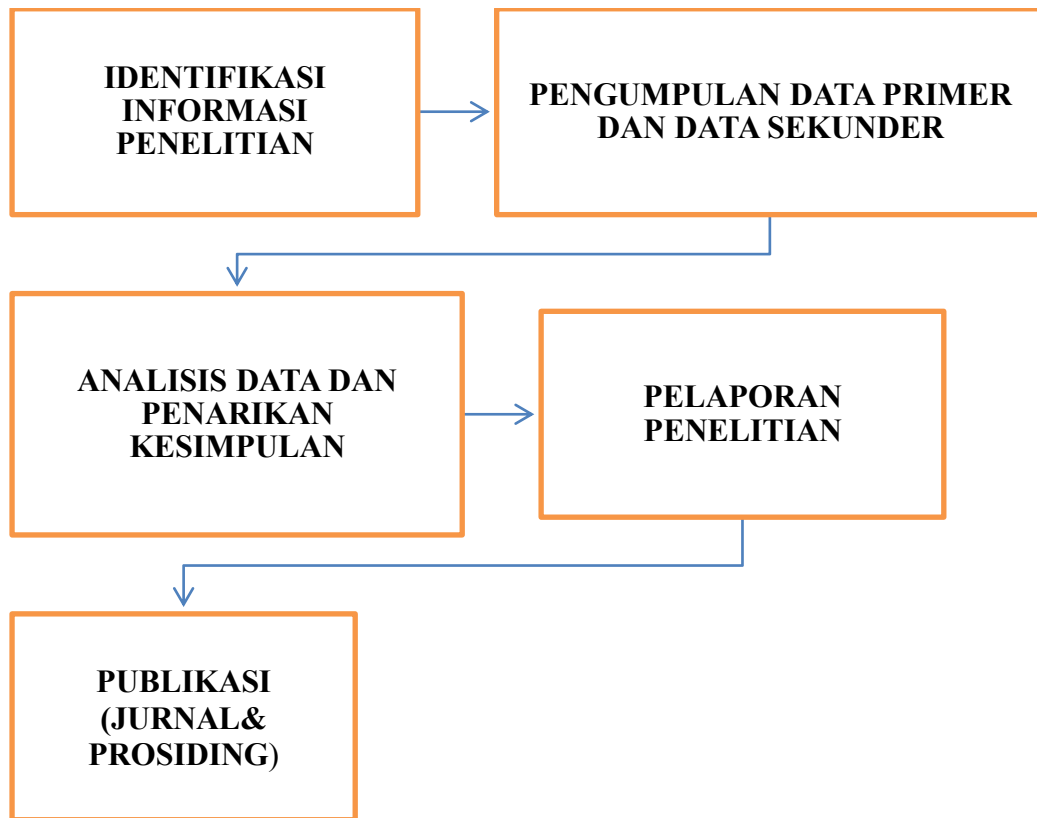
Tahap selanjutnya adalah teknik pengolahan data, yaitu:

1. Tahap editing, yaitu suatu proses pemeriksaan kembali data-data yang telah didapat atau diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan dipilah dan dipilih guna mendapatkan data-data yang benar-benar terkait dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Tabulatin, yaitu data-data kuantitatif hasil survey dibuat table-tabel tunggal dan table silang yang dapat disajikan berdasarkan prosentase dan dalam bentuk diagram-diagram.
3. Data kualitatif dibuat kategorisasi.. Pada tahap ini dikelompokkan data-data yang telah diperoleh menjadi 3 kategori sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pencegahan, penyelesaian dan pemulihan pasca konflik horizontal.
4. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian tersebut untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan berbagai data lain yang terkait.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki/terjun ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Sugiyono (2010: 245; Moleong, 2000: 207) menyatakan bahwa “Analisis telah mulai dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. Dalam penelitian ini, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan, proses data dan setelah di lapangan. Tahapan analisis data mengikuti proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Gambar 3.1. Diagram Alir dan Output Penelitian



BAB 4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat melingkupi seluruh ruang lingkup kemiskinan yang ada di wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat yang meliputi 8 Kecamatan di Kabupaten tersebut.

A. Sejarah Singkat, Luas dan Letak Wilayah

Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).

Kabupaten Tulang Bawang adalah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667) , yang merupakan Kabupaten asal Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah wilayah dengan Luas 1.201 Km², secara Hukum berdiri sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung pada tanggal 26 November 2008.

B. Kependudukan

Penduduk Tulang Bawang Barat menurut data tahun 2015 sebanyak 264.712 jiwa meningkat sebesar 2.396 jiwa dibandingkan tahun 2014. Peningkatan tersebut sebagian besar terjadi pada kelompok umur 60 - 64 sebesar 5,84% keatas.

Berdasarkan survey angkatan kerja 2015, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 126.712 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 82.185 Laki - Laki dan 44.527 Perempuan. Jika dilihat dari perbandingannya, laki-laki lebih banyak yang bekerja daripada perempuan. hal ini dapat disebabkan karena perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga dari pada bekerja. Dan terbukti dari jumlah pengangguran yang disebabkan karena mengurus rumah tangga di dominasi oleh perempuan sebesar 39.128 dari jumlah 42.419.

C. Kesejahteraan

Kesejahteraan pada dasarnya adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan baik material maupun non-material. Sementara kondisi sejahtera dapat dimaknai sebagai kondisi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Dengan demikian komponen-komponen yang perlu diperhatikan meliputi: kependudukan secara umum, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta perumahan dan lingkungan. Komponen kependudukan secara umum telah dikupas relatif mendetail pada bagian sebelumnya. Pada bagian berikut akan dibahas empat komponen lainnya.

D. Pendidikan

Pada pendidikan tingkat SD, terdapat 172 sekolah dengan jumlah murid 29.617 dan jumlah guru 2.061. Pada pendidikan SMP yang berjumlah 54 sekolah dengan jumlah murid 11.131 dan jumlah guru 1.160. Sedangkan pada tingkat SMA terdapat 14 sekolah dengan jumlah murid 3.930 dan jumlah guru 417.

E. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Barat meliputi rumah sakit puskesmas ada 10, puskesmas pembantu 40, balai pengobatan ada 9. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Barat yang paling banyak adalah tenaga kebidanan dengan jumlah 184 orang, kemudian tenaga kesehatan lainnya

sebanyak 28 orang, dan dokter umum hanya 24 orang dan dokter gigi 3 orang (Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2016). Adapun jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Barat secara rinci dapat dilihat dari table berikut:

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2016 masih belum memiliki fasilitas kesehatan yang berupa Rumah Sakit, atau masih dicukupi dengan adanya Puskesmas Rawat Inap. Seharusnya di dalam 1 Kabupaten hendaknya terdapat beberapa RS, karena bagaimanapun juga RS mempunyai fasilitas yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan Puskesmas.

Selain fasilitas kesehatan yang harus dibangun secara fisik, tenaga kesehatan atau paramedic juga perlu mendapat tempat untuk bisa diupayakan keberadaannya, karena kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi setiap manusia mempunyai sifat yang paling mendasar. Bila diperhatikan jumlah Dokter (24 orang), Perawat dan Bidan (184 orang) pada tahun 2016, persebaran Dokter masih belum sebanding dengan persebaran penduduk. Sedang untuk Perawat dan Bidan dengan jumlah sebanyak 184 orang di tahun 2016 diperkirakan belum bisa mencukupi apabila dirasiokan dengan jumlah penduduk yang mencapai 264.712 jiwa.

F. Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 191.491 penduduk usia kerja pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130.111 orang merupakan angkatan kerja, yaitu mereka yang siap masuk atau telah berkecimpung dalam kerja yang ditandai dengan aktivitas mencari pekerjaan. Dengan kata lain, terdapat 61.380 penduduk yang termasuk usia kerja namun bukan merupakan angkatan kerja, karena masih sekolah, karena mengurus rumah tangga, dan lainnya. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Barat secara rinci dapat dilihat dari tabel 2. berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2015

KegiatanUtama	JenisKelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
AngkatanKerja	84 423	45 688	130 111
Bekerja	82 185	44 527	126 712
Pengangguran Terbuka	2 238	1 161	3 399
BukanAngkatan Kerja	14 060	47 320	61 380
Sekolah/Attending School	5 776	5 429	11 205
MengurusRumahTangga/Housekeeping	3 291	39 128	42 419
Lainnya/Others	4 993	2 763	7 756
Jumlah/Total	98 483	93 008	191 491
Tingkat PartisipasiAngkatanKerja	85.72	1 588.35	1 674.07
Tingkat Pengangguran/Unemployment Rate	2.65	2.54	2.61

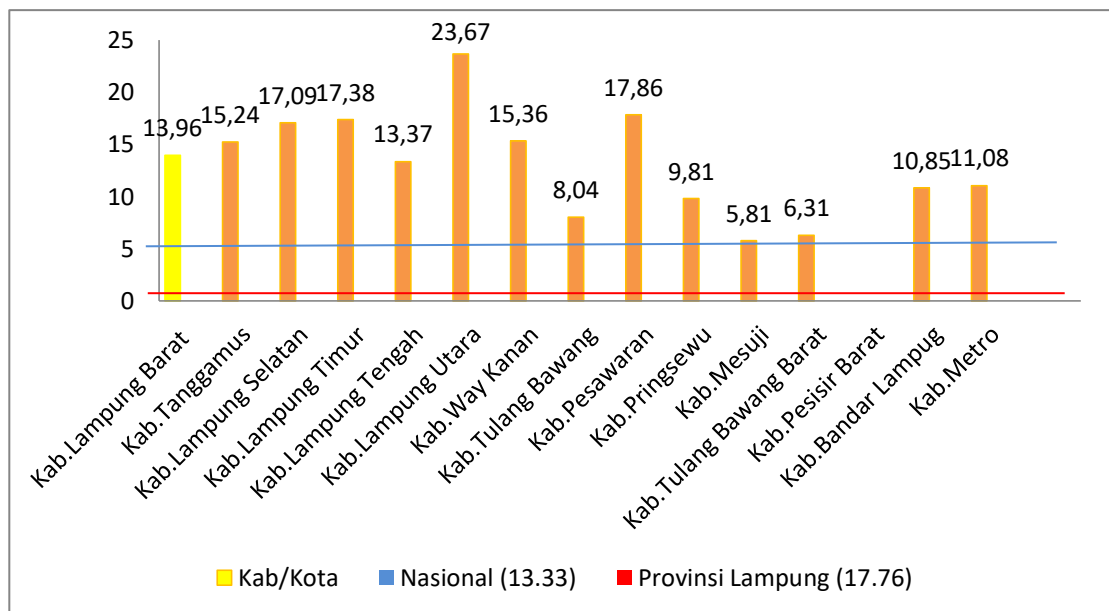
Sumber: Lampung Barat dalamAngka 2016

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kemiskinan Daerah

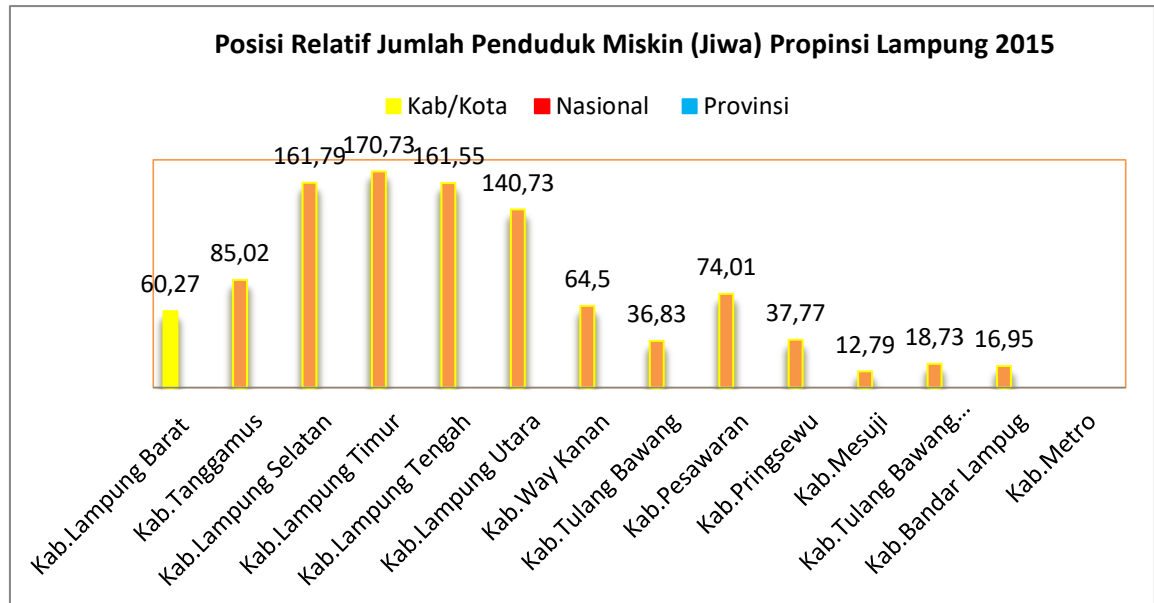
Untuk mengukur tingkat perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat Perkembangan Kondisi Kemiskinan berdasar Data BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang sekretariatnya berada di bawah Wakil Presiden. Berdasarkan data BPS Tahun 2015 jumlah penduduk kabupaten Lampung Barat berjumlah 264.712 jiwa. Sementara untuk tingkat kemiskinan Kabupaten di Tulang Bawang Barat dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnta dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Perbandingan Tingkat Kemiskian Kabupaten/Kota Propinsi Lampung Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Lampung 2015



Berdasarkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Propinsi Lampung diatas Kabupaten Lampung barat merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan terendah nomor 2, dimana tingkat kemiskinan terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 6,31%, sedangkan tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara sebesar 23,67% diikuti Kabupaten Pesawaran 17,86%. (Lampung dalam Angka 2016).

Grafik 2. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Propinsi Lampung T.A. 2015



Sedangkan relatif jumlah penduduk miskin di propinsi Lampung tahun 2014 berjumlah 1.143,930 jiwa, dimana Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki jumlah penduduk miskin 18.730 atau 18,73 % dari penduduk miskin di Propinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten nomor 2 terendah yang memiliki jumlah penduduk miskin, dimana Kabupaten Lampung Timur merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat jumlah penduduk miskin terbanyak di propinsi Lampung sebanyak 170.073 jiwa, diikuti Lampung Selatan sebanyak 161.550 jiwa. Selain itu adapun daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin tersedikit adalah Kabupaten Mesuji sebesar 12.790 jiwa (sumber BPS Provinsi Lampung).

B. Kedalaman kemiskinan (p1) dan keparahan kemiskinan (p2)

Untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Selain dapat dinyatakan dalam indikator angka kemiskinan (*headcount ratio*), kemiskinan juga dapat dinyatakan dalam dua indikator lain yang disebut dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan

(yang kerap dinotasikan dengan P1) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Sementara itu indeks keparahan kemiskinan (yang kerap dinotasikan dengan P2) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin.

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan analisa berdasarkan kepada teori bahwa semakin menurun kedalaman kemiskinan menunjukkan konsumsi penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan efektif dalam meningkatkan konsumsi golongan pendapatan rendah hingga mendekati garis kemiskinan, berdasarkan P1 maka dapat dilihat tabel bergerakan 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten/ Kota di Propinsi Lampung dimana terdapatnya penurunan P1 di tiap-tiap Kabupaten/ Kota di Lampung.

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015

Kabupaten	P1					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lambar	1,26		1,07	1,22	1,09	0,71
Tanggamus	0,96	0,75	0,97	1,20	0,96	0,64
Lamsel	1,70	1,93	1,39	1,67	1,31	0,88
Lamtim	1,18	1,62	1,22	1,66	0,85	0,80
Lamteng	1,12	0,97	0,96	1,10	0,88	0,60
Lampung utara	2,74	2,08	1,42	1,72	1,39	1,57
Way Kanan	1,19	1,49	1,00	1,37	0,84	0,93
Tulang bawang	0,90	0,56	0,47	0,50	0,41	0,35
Pesawaran	-	-	-	-	0,99	1,10
Pringsewu	-	-	-	-	-	0,68
Tuba Barat	-	-	-	-	-	0,32
Bdr. Lampung	0,68	0,61	0,21	0,74	0,48	0,097
Metro	0,55	0,70	0,64	1,04	1,07	0,72
LAMPUNG	1,19	1,30	1,07	1,25	1,12	0,80

Tabel 4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (p1) Kabupaten/Kota Propinsi Lampung Tahun 2009-2014

Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	P1	P1	P1	P1	P1	P1
Lampung Barat	3,75	2,60	2,95	2,41	1,76	1,82
Tanggamus	3,54	2,66	2,68	2,61	1,71	2,39
Lampung Selatan	4,57	3,41	2,98	3,06	2,77	2,14
Lampung Timur	3,26	3,41	3,30	3,19	2,49	2,87
Lampung Tengah	3,18	2,46	2,77	2,52	2,14	1,85
Lampung Utara	4,99	5,42	5,94	4,56	3,30	3,71
Way Kanan	3,24	3,05	2,92	2,38	1,88	2,03
Tulangbawang	1,60	1,55	1,45	1,30	0,90	1,61
Pesawaran	3,77	4,03	3,26	2,85	2,66	2,56
Pringsewu	-	2,36	1,71	1,19	0,99	1,15
Mesuji	-	1,06	0,90	0,93	0,60	0,77
Tulang Bawang Barat	-	1,35	0,99	0,91	0,97	0,74
Bandarlampung	2,10	2,99	2,15	1,74	1,76	1,53
Metro	3,27	2,46	2,27	1,35	1,54	1,74
Provinsi Lampung	3,94	2,98	2,91	2,53	2,23	2,30

Sumber BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas, maka indeks kedalaman kemiskinan (p1) Nasional adalah 2,21%, sedangkan kedalaman kemiskinan propinsi Lampung sebesar 2,98%. Kabupaten/ Kota di Propinsi Lampung memiliki indeks kedalaman kemiskinan (p1) cukup bervariasi, dimana kabupaten Mesuji memiliki indeks kedalaman kemiskinan ter rendah yaitu 0,77%, sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Lampung utara sebesar 3,71%. Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri indeks kedalaman kemiskinan (p1) sebesar 0,74%.

Adapun tingkat kedalaman kemiskinan (p1) Kab. Tulang Bawang Barat T.A 2009-2014 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dimana tahun 2010 sebesar 1,35%. Sedangkan pada tahun 2011-2014 pergerakan kedalaman kemiskinan (p1) mengalami fluktuatif dimana tahun 2011 sebesar 0,99%, tahun 2012 sebesar 0,91% Tahun 2013 sebesar 0,97 dan tahun 2014 sebesar 0,74%.

Sedangkan jika melihat tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) yaitu dimana didefinisikan bahwa semakin menurun indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin

menurun. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Adapun tabel data yang menunjukkan pergerakan 5 (lima) tahun terakhir terkait tingkat keparahan kemiskinan dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 5. Tingkat keparahan Kemiskinan (p2) Kabupaten/Kota Propinsi Lampung 2009 – 2014

Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Lampung Barat	1,09	0,71	0,79	0,56	0,46	0,36
Tanggamus	0,96	0,64	0,71	0,59	0,34	0,60
Lampung Selatan	1,31	0,88	0,72	0,79	0,74	0,47
Lampung Timur	0,85	0,80	0,88	0,92	0,60	0,72
Lampung Tengah	0,88	0,60	0,75	0,63	0,57	0,41
Lampung Utara	1,39	1,57	1,81	1,19	0,75	0,98
Way Kanan	0,84	0,93	0,75	0,54	0,42	0,42
Tulangbawang	0,41	0,35	0,32	0,28	0,17	0,46
Pesawaran	0,99	1,10	1,00	0,67	0,66	0,64
Pringsewu	-	0,68	0,44	0,19	0,15	0,21
Mesuji	-	0,19	0,17	0,18	0,12	0,17
Tulang Bawang Barat	-	0,32	0,24	0,18	0,25	0,14
Bandarlampung	0,48	0,97	0,50	0,40	0,43	0,38
Metro	1,07	0,72	0,63	0,25	0,30	0,46
Provinsi Lampung	1,12	0,72	0,79	0,62	0,59	0,56

Sumber BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas, maka Kabupaten/ Kota di Propinsi Lampung memiliki indeks keparahan kemiskinan (p2) cukup bervariasi, dimana kabupaten Tulang bawang Barat memiliki indeks kedalaman kemiskinan terendah yaitu 0,14%, sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Utara sebesar 0,98%. Kabupaten Lampung Barat sendiri indeks keparahan kemiskinan (p2) sebesar 0,36%.

C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Analisis SWOT adalah alat perencanaan yang digunakan untuk memahami Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang terlibat dalam organisasi. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi

yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja.

1. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor
 - a. *Strengths* (Kekuatan). Atribut positif yang ada di internal organisasi dan Atribut tersebut dalam kendali organisasi.
 - b. *Weakness* (Kelemahan). Faktor-faktor yang berada dalam kendali organisasi yang mengurangi kemampuannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Area-area yang memungkinkan diperbaiki oleh organisasi.
2. Analisis eksternal meliputi penilaian terhadap factor:
 - a. *Opportunities* (Peluang). Faktor eksternal yang menarik yang mewakili alasan bagi suatu organisasi untuk tetap eksis dan berkembang. Kesempatan apa yang ada di lingkungan, yang akan mendorong organisasi?. Mengidentifikasi mereka dengan “frame waktu”.
3. *Threats* (Ancaman)
 - a. Faktor eksternal, di luar kendali organisasi, yang dapat menempatkan misi organisasi atau operasi beresiko.
 - b. Organisasi dapat mengambil manfaat dengan memiliki rencana darurat untuk mengatasinya jika ancaman-ancaman itu harus terjadi.
 - c. Klasifikasikan mereka dengan “keseriusan” dan “kemungkinan terjadinya”.

Strategi pembangunan daerah Lampung Barat berdasarkan analisis SWOT. Terbagi dalam 4 kelompok yang berisi strategi-strategi, berikut: **Pertama**, strategi S–O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang pertama ini mencakup:

1. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan;
2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Investasi;
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif (*good Governance*);
5. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal;
6. Mengarustamakan gender dan Perlindungan Anak.

Kedua, strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Di dalam strategi yang kedua ini mencakup:

1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster;
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan yang bermoral dan berakhlak;
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan;
4. Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran;
6. Mengembangkan Infrastruktur dan Tata Ruang;
7. Meningkatkan Kesadaran Hukum.

Ketiga, strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman. Di dalam strategi ini mencakup:

1. Memberdayakan Kelompok Masyarakat;
2. Mengembangkan Jejaring antar daerah pemerintah Provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi;

Keempat, strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan. Di dalam strategi ini mencakup:

1. Mengembangkan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian dan perkebunan;
2. Regulasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Daerah;
3. Meningkatkan Akses Transportasi dan Informasi;
4. Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan;
5. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal.

Keempat strategi utama itu dimaksudkan untuk mencapai adanya masyarakat Tulang Bawang Barat yang mandiri, sejahtera dan adil. Di dalam mewujudkan masyarakat demikian, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu memberikan pelayanan (*to serve*), melakukan pengaturan (*to regulate*) dan memberdayakan (*empowering*). Adapun langkah-langkah utamanya dibagi ke dalam tiga tahapan pokok. Pertama adalah

tahap konsolidasi, baik konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. Konsolidasi internal berkaitan dengan upaya untuk mengkonsolidasikan pola pikir dan peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan kebijakan dan regulasi, konsolidasi program, dan adanya komitmen banyak pihak (*stakeholders*) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan konsolidasi eksternal dilakukan terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di luar pemerintahan, baik kekuatan masyarakat sipil maupun pasar. Kedua adalah tahap peningkatan kesejahteraan. Tahap ini dilakukan melalui penerapan tiga strategi pokok di dalam pembangunan, yaitu *pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment*. Melalui empat strategi pokok ini, adanya pertumbuhan sekaligus pemerataan pembangunan akan lebih mudah diraih. Tahap terakhir adalah adanya peningkatan kemandirian masyarakat Lampung Barat dalam berbagai dimensi, mulai dari segi ekonomi sampai budaya. Tahap yang terakhir ini memungkinkan terbukanya pintu lebih lebar bagi terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang sejahtera dan adil.

Berdasarkan arah umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya penanggulangan kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan maka dirumuskan strategi utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

1. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar

Strategi ini berhubungan dengan semua kebutuhan kaum miskin seperti akses ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pangan yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin.

2. Strategi memperbaiki program perlindungan sosial

Strategi ini berhubungan dengan kebutuhan kaum miskin dalam menghadapi guncangan (*shock*) dalam hidup seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, serta guncangan yang disebabkan adanya bencana alam dan sebagainya.

3. Strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin

Strategi ini berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat miskin sebagai upaya agar masyarakat tidak semata-mata diposisikan sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu dilakukan agar masyarakat khususnya kelompok miskin dapat berupaya secara mandiri untuk keluar dari kemiskinan serta memiliki ketangguhan agar tidak terjebak dalam kemiskinan lagi.

4. Strategi pembangunan inklusif

Strategi ini berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan dapat memberi manfaat serta menumbuhkan rasa ikut memiliki kepada seluruh masyarakat.

5. Strategi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan

Strategi ini berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelaku, penataan manajemen serta struktur pengorganisasian kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik yang ada di daerah.

6. Strategi reorientasi kebijakan. Strategi ini yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

D. Skenario dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu lima tahun (2017-2022) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Rencana aksi disusun agar strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

1. Kebijakan Penganggaran

Kebijakan anggaran yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan berupa pengurangan jumlah orang miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan sulit

tercapai bila orientasi alokasi anggaran tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan tidak direalokasikan untuk tujuan mendorong peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan dalam arti yang luas. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Dalam kebijakan penganggaran dapat di dorong untuk menjamin terselenggaranya penganggaran yang berpihak untuk kepentingan orang miskin (*Pro Poor Budgetting*).
- b. Penggalian potensi serta optimalisasi pendanaan Non APBD (CSR, PKBL, Lembaga Zakat) sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan yang terpadu.
- c. Kesamaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) dalam menyusun anggaran serta pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut.

2. Kebijakan Integrasi Perencanaan

Dalam rangka untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di masing-masing OPD. Beberapa langkah diupayakan untuk terselenggaranya proses perencanaan program yang terintegrasi melalui mekanisme perencanaan dari tingkat Desa/Kelurahan sampai di kabupaten. Dalam proses perancangan dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan diselenggarakan dengan menjadikan dokumen OKD sebagai acuan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan baik pusat maupun daerah.

3. Kebijakan Penguatan Kelembagaan TKPK

Kelembagaan adalah salah satu persoalan yang amat mendasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, Penguatan kelembagaan menjadi fokus penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi serta asistensi secara terpadu antar lintas pelaku, lintas program dalam penyiapan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

4. Kebijakan Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh

sebab itu, rencana aksi penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Program pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dalam RPJMD tahun 2017-2022 terdiri dari program pada setiap OPD yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dalam kerangka regulasi. Untuk menekan angka kemiskinan diperlukan realisasi program pembangunan di segala bidang, demikian juga dengan penanggulangan kemiskinan berbasis hak.

5. Mekanisme Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk merealisasikan rencana yang ada pada dokumen OPD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rencana aksi direalisasikan dalam upaya mewujudkan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak hak dasar pada masyarakat miskin. Rencana aksi disusun agar strategi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

6. Prasyarat Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana apabila prasyarat berikut ini terpenuhi, yaitu :

1. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku usaha dan berbagai pihak untuk melaksanakan secara konsisten peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar dan membatalkan peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan pemenuhan hak-hak dasar.

2. Komitmen dan keinginan yang kuat dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan berbagai pihak untuk mengelola anggaran negara dan anggaran daerah secara terbuka, bertanggung jawab, efisien dan efektif.
3. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai pihak untuk mengembangkan dan memantapkan lembaga dan organisasi masyarakat setempat sebagai wadah partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
4. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku usaha dan berbagai pihak untuk menghapuskan berbagai bentuk penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, pungutan liar, penggusuran paksa tanpa kompensasi dan tindak kekerasan yang merugikan masyarakat miskin.
5. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah dan lembaga internasional untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai utang dan hibah secara terbuka, terpadu, bertanggungjawab, efisien dan efektif.

7. Pelembagaan Rencana Aksi

Penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan hak-hak dasar memerlukan pemihakan dari organisasi dan lembaga pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat, maka perlu ada lembaga yang dapat mendukung terlaksananya rencana aksi.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPK kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas : Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten. Dalam

melakukan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka TKPK Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan Review OPD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai dasar implementasi RPJMD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian forum OPD atau forum gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;
- c. Pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan OPD;
- d. Pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD; dan
- e. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Dalam mengendalikan tugas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, maka TKPK kabupaten memiliki fungsi pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- a. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- b. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- c. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- e. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk sekretariat TKPK kabupaten yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK. Sekretariat TKPK kabupaten berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Jaringan Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, diperlukan kerjasama di semua level pemerintahan, swasta dan organisasi masyarakat. Adapun peran dari masing masing jaringan kerja sebagai berikut :

a. Jaringan Pemerintah Pusat

Sebagai bagian dari jaringan kerja rencana aksi penanggulangan kemiskinan, maka diharapkan pemerintah pusat mengkaji kembali berbagai peraturan yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, menetapkan peraturan perundang undangan yang melindungi hak-hak dasar, melaksanakan penegakan hukum.

b. Jaringan Pemerintah Provinsi Lampung

Pemerintah provinsi mempunyai peran dalam penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung dan mendorong kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

c. Jaringan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah kabupaten mempunyai peran langsung dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat miskin; meningkatkan pelayanan publik yang murah, cepat dan bermutu; melakukan fasilitasi dan mediasi; mendorong pelaku pembangunan lain untuk menjadi pelaku aktif dalam penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten adalah:

1. Melakukan pembaharuan tata pemerintahan dan reformasi birokrasi di daerah.

2. Bersama DPRD memprioritaskan anggaran dan sumberdaya guna mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
3. Menciptakan lingkungan yang mendukung melalui penetapan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan.
4. Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) Daerah yang menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
5. Meningkatkan pemanfaatan data kuantitatif dan kualitatif sebagai acuan dalam diagnosa kemiskinan dan perumusan kebijakan, tujuan dan sasaran yang lebih jelas dan terukur dengan memperhatikan kondisi lokal dan komitmen internasional.
6. Revitalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai forum koordinasi, mediasi dan konsultasi berbagai pihak dalam perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
7. Melakukan survei tiga bulanan, survei enam bulanan dan survei tahunan tentang jumlah dan mutu pelayanan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan sanitasi, air bersih dan sebagainya.
8. Melakukan sosialisasi, diseminasi dan kampanye tentang tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
9. Mendorong terbentuknya unit-unit pengaduan masalah guna mengatasi secara cepat setiap kasus yang dialami oleh masyarakat miskin.
10. Mengembangkan indikator kinerja dan sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu sebagai dasar pengkajian terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan.
11. Meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumberdaya, membangun solidaritas dan jaringan, menyiapkan kerangka hukum dan memperbaiki pelayanan umum yang baik dan terjangkau bagi masyarakat.
12. Memasukkan pemecahan masalah kemiskinan sebagai dasar penilaian laporan pertanggung jawaban pimpinan daerah.
13. Mengembangkan mekanisme dan fungsi koordinasi baik di Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Mengembangkan dialog dan jejaring sebagai pembelajaran melalui pengembangan e-government, penyebaran lewat website, dan peran asosiasi.

d. Jaringan Pelaku Usaha dan Perbankan

Pelaku usaha merupakan pihak yang langsung dalam kegiatan investasi, produksi, distribusi barang dan jasa yang memberikan dampak pada masyarakat miskin. Pelaku usaha swasta dapat berperan dalam penyediaan modal dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak dan pengembangan fasilitas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dalam ikut serta pada penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Menyediakan akses lapangan kerja dan usaha pada masyarakat miskin melalui kemitraan usaha. Memperkuat usaha mikro melalui dana perbankan, bantuan teknis dan pendampingan usaha mikro. Untuk memperkuat usaha mikro melalui dana perbankan, maka Pemerintah kabupaten Lampung Barat memberikan kemudahan bagi Usaha Kecil Mikro yang belum *bankable* melalui Bank BPR Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh para usaha mikro tersebut untuk mendapatkan kredit.
2. Memastikan produksi yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan hidup.
3. Memastikan produksi yang tidak membahayakan konsumen.
4. Memastikan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam perekrutan pegawai dan pengembangan usaha.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban sosial dalam berbagai bentuk (beasiswa, pengembangan masyarakat, dukungan kepada lembaga pendidikan dan penelitian).
6. Menggalang dana untuk disalurkan kepada perorangan dan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan.

e. Jaringan LSM , Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi, adalah:

1. Melakukan pendampingan bagi kelompok miskin, kaum perempuan, anak-anak, kelompok marjinal lainnya yang sering tidak terwakili atau tidak cukup memiliki sumberdaya untuk memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan mereka.
2. Melakukan advokasi bagi masyarakat miskin dalam negosiasi langsung dengan para pengambil keputusan dan bantuan perlindungan hukum.
3. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada masyarakat miskin agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak.
4. Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha.
5. Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan anggaran.
6. Memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
7. Bersama pemerintah, mengembangkan dan mendorong pelembagaan forum warga dan forum lintas pelaku sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

f. Jaringan Organisasi Masyarakat dan Keagamaan

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan memiliki dampak luas dan berkelanjutan apabila didukung dan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan nilai-nilai moral tentang persamaan dan tanpa diskriminasi sebagai prinsip utama hak-hak dasar masyarakat.
2. Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat miskin.

3. Melakukan diseminasi, sosialisasi dan kampanye mengenai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
4. Bersama dengan pemerintah, mengembangkan dan mendorong pelembagaan forum warga dan forum lintas pelaku sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
5. Melakukan advokasi bagi masyarakat miskin dalam negosiasi langsung dengan para pengambil keputusan dan bantuan perlindungan hukum.
6. Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha swasta.
7. Mengembangkan pemahaman sosial yang mendukung perlindungan hak dasar masyarakat miskin.
8. Menyuarakan dan memperkuat pembelaan bagi kelompok miskin, kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya untuk memperjuangkan hak-hak dasar dan kebutuhan mereka.
9. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak.
10. Memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

9. Penganggaran Rencana Aksi

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui kebijakan program dan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Rencana Kerja OPD. Keberhasilan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin ditentukan oleh pengelolaan anggaran daerah yang menyangkut prinsip penganggaran, reorientasi pengelolaan anggaran dan pengarusutamaan kebijakan dan program.

a. Prinsip Pengelolaan Penganggaran

Secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah : responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemandirian, kemitraan, adil dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran, maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

anggaran harus melibatkan masyarakat (publik). Penerapan prinsip pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang bisa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja. Dalam arti setiap program, proyek, dan kegiatan harus mempunyai indikator capaian yang jelas dan terukur, untuk lebih jelas, maka prinsip prinsip pengelolaan anggaran di jelaskan satu persatu sebagai berikut :

1. **Responsif**: Anggaran yang direncanakan oleh pemerintah adalah sesuai dengan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.
2. **Partisipatif**, Perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
3. **Transparan**, Penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terbuka melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.
4. **Rasional**, Penganggaran penanggulangan kemiskinan dirumuskan secara cermat, jelas dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
5. **Kemandirian**, Pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan didukung sepenuhnya dari sumber dana dalam negeri sehingga tidak menciptakan ketergantungan dan ketidakpastian.
6. **Kemitraan** Pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka peluang seluas-luasnya bagi pengembangan kemitraan.
7. **Adil**, Penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama masyarakat miskin.
8. **Akuntabel**, Anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan rencana aksi dan pelaksanaan rencana aksi dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik secara terbuka.

10. Optimalisasi Peluang Dana Sosial Lainnya

Selain dana yang didapat dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga berupaya menggalakkan dana yang berasal dari masyarakat. Dana dari masyarakat dapat berupa Zakat Infak dan Sodakoh (ZIS). Selain dana masyarakat terdapat juga dana CSR dari perusahaan perusahaan besar, misalnya CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan milik pemerintah atau swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan sebagainya dapat membantu pemerintah pada penanggulangan bencana, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan lingkungan. Reorientasi pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah dengan harapan dapat mendukung rencana aksi, rencana aksi diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

11. Mengantisipasi Hambatan-Hambatan Rencana Aksi

Pada upaya pelaksanaan rencana aksi, Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu untuk melakukan antisipasi terhadap hambatan yang mungkin terjadi, karena rencana aksi pada upaya penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak hak dasar adalah kejadian yang baru di lingkungan pemerintahan dan masyarakat umum, tentu masih banyak orang di lingkungan pemerintahan yang belum lancar melaksanakan.

Pertama, hambatan sumber daya manusia. Keterbatasan sumberdaya manusia (aparatur dan masyarakat) sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan hak-hak dasar. Hambatan sumber daya manusia pada rencana aksi penanggulangan kemiskinan lainnya adalah *pragmatisme* Pemerintah Daerah. Birokrasi Pemda kebanyakan masih alergi dengan masyarakat sipil yang kritis. Tidak mengherankan bila sedikit TKPKD yang melibatkan masyarakat sipil atau LSM yang kritis. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga lebih banyak menggunakan jasa konsultan untuk penyusunan atau mengkaji SPKD, dengan alasan bahwa proyek tersebut biayanya terbatas bila banyak melibatkan kelompok masyarakat. Hal ini karena kultur birokrasi adalah Surat Keputusan, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah sebagai dasar pembiayaan. Hambatan juga terdapat pada anggota Tim TKPKD, sampai

sekarang masih banyak anggota TKPKD yang belum melaksanakan tugas secara optimal. Kalau juga sudah terdapat anggota TKPKD maka anggota tim masih belum memahami tugas dan fungsinya.

Kedua, hambatan perubahan kebijakan. Adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan berbagai perbedaan persepsi dan friksi pada pemerintah Daerah yang berdampak pada dukungan yang kurang terhadap keberlangsungan SPKD. Pergantian pimpinan daerah kabupaten sering diikuti dengan perubahan kebijakan. Kebijakan yang baru biasanya tidak sejalan dengan kebijakan terdahulu, sehingga sangat mempengaruhi keberlanjutan rencana aksi. Oleh sebab itu, perlu ada upaya penguatan komitmen dan keinginan dari aparat Pemerintah Daerah yang didukung seluruh pelaku (stakeholder) untuk secara konsisten mengacu pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang telah disepakati. Upaya lain dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan rencana aksi adalah mengusahakan secara berkesinambungan pemberian pemahaman bagi siapapun yang berkuasa untuk melanjutkan dan melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan. Dari segi kebijakan pembangunan, berbagai perubahanpun terjadi sedemikian cepat, termasuk kebijakan dalam pola penanggulangan kemiskinan. Upaya antisipasi agar rencana aksi dapat berjalan secara berkelanjutan, maka perlu dilaksanakan :

1. Penguatan Peran dan Fungsi Pokja TKPK.
2. Pelembagaan mekanisme integrasi perencanaan.
3. Keterlibatan masyarakat miskin pada proses penyusunan kebijakan atau pengambilan keputusan secara konsisten.
4. Melaksanakan review kebijakan secara berkala.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan arah umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya penanggulangan kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan maka dirumuskan strategi utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

1. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar

Strategi ini berhubungan dengan semua kebutuhan kaum miskin seperti akses ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pangan yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin.

2. Strategi memperbaiki program perlindungan sosial

Strategi ini berhubungan dengan kebutuhan kaum miskin dalam menghadapi guncangan (*shock*) dalam hidup seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, serta guncangan yang disebabkan adanya bencana alam dan sebagainya.

3. Strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin

Strategi ini berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat miskin sebagai upaya agar masyarakat tidak semata-mata diposisikan sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu dilakukan agar masyarakat khususnya kelompok miskin dapat berupaya secara mandiri untuk keluar dari kemiskinan serta memiliki ketangguhan agar tidak terjebak dalam kemiskinan lagi.

4. Strategi pembangunan inklusif

Strategi ini berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan dapat memberi manfaat serta menumbuhkan rasa ikut memiliki kepada seluruh masyarakat.

5. Strategi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan

Strategi ini berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelaku, penataan manajemen serta struktur pengorganisasian kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik yang ada di daerah.

6. Strategi reorientasi kebijakan. Strategi ini yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu lima tahun (2017-2022) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Rencana aksi disusun agar strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

B. SARAN

Kebijakan anggaran yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan berupa pengurangan jumlah orang miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan sulit tercapai bila orientasi alokasi anggaran tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan tidak direalokasikan untuk tujuan mendorong peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan dalam arti yang luas. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku usaha dan berbagai pihak untuk melaksanakan secara konsisten peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar dan membatalkan peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan pemenuhan hak-hak dasar.
2. Komitmen dan keinginan yang kuat dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan berbagai

pihak untuk mengelola anggaran negara dan anggaran daerah secara terbuka, bertanggung jawab, efisien dan efektif.

3. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai pihak untuk mengembangkan dan memantapkan lembaga dan organisasi masyarakat setempat sebagai wadah partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
4. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku usaha dan berbagai pihak untuk menghapuskan berbagai bentuk penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, pungutan liar, penggusuran paksa tanpa kompensasi dan tindak kekerasan yang merugikan masyarakat miskin.
5. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah dan lembaga internasional untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai utang dan hibah secara terbuka, terpadu, bertanggungjawab, efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- BPS. 2017. Tulang Bawang Barat dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
- BPS. 2017. Lampung dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
- Cox, David. 2004. *Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region* . Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Maleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). 2016. Tulang Bawang Barat
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). 2016. <http://www.tnp2k.go.id>. Diakses 20 Juli 2018
- <http://ragamlampung.com/2017/01/05/jumlah-penduduk-miskin-meningkat-di-tulangbawang-barat/>

LAMPIRAN

BIODATA KETUA PENELITI

A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	198503152014041002
5	NIDN	0015038504
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gunung Kidul, 15 Maret 1985
7	Alamat Rumah	Jl. P. Pandan, No. 39, RT. 012, LK. I, Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	085369037666
9	Alamat Kantor	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145
10	Nomor Telepon/Faks	(0721)704626
11	Alamat e-mail	damar.wibisono@yahoo.co.id
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Sosiologi 2. Pendidikan Pancasila 3. Pendidikan Kewarganegaraan 4. Gender dan Pembangunan 5. Pengembangan SDM dan Pengorganisasian Masyarakat 6. Manajemen Pembangunan Sosial 7. Perencanaan Kota dan Daerah 8. Sosiologi Agama

B. Riwayat Pendidikan

No	Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1	2009	Sarjana (S-1)	Universitas Lampung	Sosiologi
2	2011	Magister (S-2)	Universitas Gadjah Mada	Sosiologi minat Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial

C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2011	Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pasca Keberadaan PT. Menggala Sawit Indo (Studi di Desa Lingai, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang	Mandiri	3.000.000

2	2015	Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Kebijakan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus	Dipa BLU Unila	11.000.000
3	2015	Integrasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi (Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)	Dipa Fisip Unila	6.000.000
4	2015	Tata Cara Adat Istiadat Lampung Masyarakat Tanggamus (Kajian Empat Kepaksian Adat Sai Batin Tanggamus)	Hibah Pemda Tanggamus	80.000.000
5	2016	Tanggapan Masyarakat Penerima Raskin Terhadap Pelaksanaan Distribusi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kotamadya Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	6.000.000
6	2017	Analisis Peran Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Lampung Lampung Dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung (Kajian Kritis terhadap, Tantangan, dan Hambatan Pelaksanaan Tupoksi KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung)	Dipa Unggulan Fisip Unila	15.000.000
7	2017	Ketakutan Menjadi Korban Kejahatan (<i>Fear of Criminal Victimization</i>) di Lingkungan Kampus (Studi pada Mahasiswa di Universitas Lampung Tahun 2017)	Dipa Fisip Unila	7.000.000
8	2017	Analisis Perilaku Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)	Dipa Fisip Unila	7.000.000
9	2017	Mengukur Tata Kelola Pemerintahan Kab/Kota Provinsi Lampung (Studi Perbandingan Transparansi Birokrasi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro)	Dipa Unggulan Fisip Unila	15.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2014	Penyuluhan tentang Peran Orang Tua dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja	Dipa Fisip Unila	5.000.000
2	2015	Upaya Peningkatan Perekonomian dengan Menumbuhkan Kesadaran Berwirausaha Pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5.000.000
3	2016	Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Dipa Fisip	5.000.000

		Bagi Mahasiswa	Unila	
4	2016	Sosialisasi Penguatan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal	Dipa Unggulan Junior Fisip Unila	10.000.000
5	2017	Mencegah Pelecehan Seksual Dikalangan Remaja (Desa Mojokerto, Kec. Padang Ratu, Kab. Lampung Tengah)	Mandiri	3.000.000
6	2017	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa dan Penguatan Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Melalui Diklat Pembuatan Website Program Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal	Dipa BLU Senior Unila	20.000.000
7	2017	Penyuluhan Tentang Pemantapan Etika Mahasiswa di Lingkungan Kampus pada Mahasiswa Baru Fisip Unila	Dipa BLU Fisip Unila	8.000.000
8	2017	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Rencana Induk Penelitian (RIP) Jurusan Sosiologi	Dipa BLU Fisip Unila	8.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Vol/No	Nama
1	2014	Peran Sosial dan Ekonomi Perempuan Pedagang Sayur	Vol. 16, No. 2, 2014	Sociologie

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Orale Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Vol/No	Nama
1	2016	Pola Interaksi Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Register 25 dan Register 26 Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus	Prosiding Sefila 2016	Prosiding Seminar Nasional Fisip Unila 2016

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Tata Cara Adat Istiadat Lampung Masyarakat Tanggamus (Kajian Empat Kepaksian Adat Saibatin Tanggamus)	2015	441 hlm	LPPM Unila
2	Manajemen Konflik	2017	78 hlm	CV Anugrah

				Utama Raharja (AURA)
--	--	--	--	-------------------------

H. Kegiatan Seminar/Lokakarya/Pelatihan/Worskhop yang Pernah diikuti dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat	Panitia/ peserta/ pembicara
1	2014	Workshop Penyusunan Silabus, Kontrak Perkuliahan dan SAP	FISIP Unila	Agustus 2014, Bandar Lampung	Peserta
2	2014	Lokakarya Buku Ajar Berbasis KBK FISIP Unila	FISIP Unila	September 2014, Bandar Lampung	Peserta
3	2014	Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	LEMHANAS RI	Oktober 2014, Bandar Lampung	Peserta
4	2015	Kuliah Umum: <i>Identity, Multiculturalism and Maritime Society: Sharing the Nusantara and Malay Archipelago Story</i>	Sosiologi FISIP Unila	Maret 2015, Bandar Lampung	Panitia
5	2016	Seminar FISIP Unila: Tantangan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi Bonus Demografi 2020-2030	FISIP Unila	November 2016, Bandar Lampung	Peserta
6	2016	Seminar Daerah Sosiologi: Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa	Jurusan Sosiologi FISIP Unila	November 2016, Bandar Lampung	Panitia
7	2017	Bimbingan Teknis “Diplomasi Budaya Damai dalam Rangka Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Kebudayaan Pada Generasi Muda di Provinsi Lampung”	Sub Direktorat Diplomasi Budaya Dalam Negeri Direktorat Warisan Dan Diplomasi Budaya dengan (CCR), Fisip	Mei 2017, Bandar Lampung	Pembicara

			Universitas Lampung		
8	2017	Seminar Nasional FISIP Unila "Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat yang Berkeadilan"	Fisip Universitas Lampung	8 Oktober 2017, Bandar Lampung	Peserta
9	2017	Pelatihan Teknik <i>Most Significant Change (MSC)</i> suatu Penelitian Kualitatif dan Metodologi M & E (Monitoring dan Evaluasi)	Circle Indonesia	12-14 September 2017, Bandar Lampung	Peserta
10	2017	Pelatihan Program STATA untuk Pengolahan Data IFLS	Survey Meter Indonesia	4-6 Oktober 2017, Bandar Lampung	Peserta

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **Penelitian DIPA FISIP Universitas Lampung** tahun 2018.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2018
Ketua Peneliti,



Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP 198503152014041002

BIODATA ANGGOTA PENELITI (1)

A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Drs. Suwarno, M.H.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	196506161991031003
5	NIDN	0016066516
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kota Agung, 16 Juni 1965
7	Alamat Rumah	Jl. Pangeran Antasari Gang Sadar I No. 18 Rt 03 Kedamaian Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	08127942904
9	Alamat Kantor	Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	(0721)704626
11	Alamat e-mail	mhsuwarno@yahoo.com
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Sosiologi Hukum 2. Sosiologi Kriminalitas 3. Pengantar Ilmu Hukum 4. Sistem Sosial Budaya Indonesia 5. Pengantar Sosiologi

B. Pengalaman Penelitian Dalam 7 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2010	Efektifitas Penanggulangan Anak Jalanan	Dipa Fisip Unila	5
2	2011	Prostitusi dan Upaya Penanggulangannya	Dipa Fisip Unila	5
3	2012	Bentuk Kebijakan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Badan Narkotika Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	5
4	2013	Potret Budaya Masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	6
5	2014	Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Hubungan Seksual di Luar Nikah di Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	6
6	2015	Integrasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan	Dipa Fisip Unila	6

		Masyarakat Pribumi (Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)		
7	2015	Implementasi Kearifan Lokal Piil Pesenggiri (Studi Penguatan Pemahaman, Pemberdayaan dan Implementasi Kearifan Lokal Unsur-Unsur Piil Pesenggiri pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Lima Lampung Selatan)	Dipa BLU Unila	11
8	2016	Konflik antara Etik Pendatang dan Penduduk Lokal (Studi Fenomenologi: Prilaku Komunikasi Pra dan Pasca Penyerangan Etnik Lampung Terhadap Etnik Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan).	Dipa BLU Unila	15
9	2016	Tanggapan Masyarakat Penerima Raskin Terhadap Pelaksanaan Distribusi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	6
10	2017	Analisis Peranan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran Di Provinsi Lampung	Dipa Fisip Unila	7
11	2017	Analisis Perilaku Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)	Dipa Fisip Unila	7

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 6 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2012	Pelatihan Penulisan dan Pembuatan Bahan Ajar Responden Gender bagi Guru Sekolah Menengah Pertama	Dipa Fisip Unila	5
2	2012	Sosialisasi Pengembangan Bahan Ajar Sosiologi bagi Guru SMU, SMK dan MA di Kota Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	5
3	2013	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan tentang Hutan Tanaman Rakyat di Tiga Desa di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5
4	2013	Penyuluhan Tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja	Dipa Fisip Unila	5
5	2014	Penyuluhan Tentang Peranan Orang Tua dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5
6	2015	Upaya Peningkatan Perekonomian dengan Menumbuhkan Kesadaran Berwirausaha pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5
7	2016	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5
8	2017	Penyuluhan Tentang Pemantapan Etika Mahasiswa Di Lingkungan Kampus Pada Mahasiswa Baru Fisip Unila	Dipa Fisip Unila	8

D. Pengalaman dalam Penulisan Buku Ajar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2010	Sistem Sosial Budaya Indonesia	139	Unila
2	2011	Sosiologi Kriminalitas	159	Unila
3	2012	Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal	249	Unila
4	2013	Sosiologi Hukum	153	Unila
5	2014	Pengantar Ilmu Hukum	120	Unila

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **Penelitian DIPA FISIP Universitas Lampung** tahun 2018.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2018

Peneliti,



Drs. Suwarno, M.H.

NIP 196506161991031003

BIODATA ANGGOTA PENELITI (2)

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Drs. Abdul Syani, M.IP.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	19570704198503 1 025
5.	NIND	0004075705
6.	Tempat, Tanggal Lahir	Kalianda, 4 Juli 1957
7.	E-mail	abdul.syani@gmail.com abdulsyani@yahoo.co.id
8.	No. Telepon/HP	081957312000
9.	Alamat Kantor	Jl.Prof.Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedongmeneng Bandar Lampung-35144
10.	Nomor Telepon/Faks	0721-704626
11.	Alamat Kantor	Jl.Prof.Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedongmeneng Bandar Lampung-35144
12.	Mata Kuliah Yang Diampu	Sosiologi Hukum
		Pengantar Sosiologi
		Sistem Sosial Budaya Indonesia
		Sejarah Lampung dan Masyarakat Multikultural
		Pendidikan Moral dan Kearifan Lokal
		Sosiometri dan Dinamika Kelompok
Teori-teori Pembangunan Masyarakat		
Sosiologi Organisasi dan Manajemen		

B. Riwayat Pendidikan

Program	S-1	S-2	S-3
Nama PT	UGM	UNILA	-
Bidang Ilmu	Sosiologi	Ilmu Pemerintahan	-
Tahun Masuk	1977	2007	-
Tahun Lulus	1982	2009	-
Judul Sripsi/Tesis/ Disertasi	Pengaruh Status Ekonomi Sosial terhadap Aktivitas Gotong Royong	Pengaruh Disiplin Kerja Aparat Pemerintah terhadap Efektivitas Pelayanan Publik	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Dr. Suwartinah	Prof. Dr. Yulianto, MS.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (bukan skripsi, tesis, disertasi)

1	2014	Pemetaan Konflik Sosial di 5 (Lima) Kabupaten di Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung	100.000.000
2	2015	Penetapan Status Keekerabatan Dalam Prosesi Adat Angkon Muwakhi Pasca Penyelesaian Konflik	DIPA FISIP Unila	7.000.000
3	2016	Rekonstruksi Sistem <i>Muakhi</i> Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Dalam Resolusi Konflik Sosial	Kemenristek Dikti Hibah Bersaing	80.000.000
4	2016	Pelestarian Benda Budaya Lamban Balak Kebandaran Marga Legun Lampung Saibatin Kalianda	DIPA FISIP Unila	7.000.000
5	2017	Angkon Muwakhi sebagai Instrumen resolusi konflik sosial	Kemenristek Dikti Hibah Bersaing	60.000.000
6	2017	Pelestarian Benda Budaya Lamban Balak Kebandaran Marga Legun Lampung Saibatin Kalianda	DIPA FISIP Unila	7.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Selama 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Pendanaan	Jml (Juta Rp)
1.	2008	Pelatihan Metode Report Card bagi Tokoh masyarakat sebagai suatu cara memberdayakan warga dalam menilai Pelayanan Publik di sektor Jasa penyediaan Air Bersih PDAM Way Rilau Bandar Lampung	LPM Unila	3.000.000
2.	2011	Sosialisasi Pembelajaran Sosiologi terhadap Guru SMA Bandar Lampung, diselenggarakan di Fisip Universitas Lampung	LPM Unila	5.000.000
3.	2012	Pelatihan Penulisan dan Pembuatan Bahan Ajar Responsif Gender bagi Guru Sekolah Menengah Pertama, Surat Tugas Ka.Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unila	LPM Unila	5.000.000

		No.77/UN.26/6/KU/2012, 14 Mei 2012, diselenggarakan di Hotel Kridawisata Bandar Lampung, 2012		
4	2017	Penyuluhan Tentang Pemantapan Etika Mahasiswa Di Lingkungan Kampus Pada Mahasiswa Baru Fisip Unila	DIPA FISIP Unila	8.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Perubahan Tradisi <i>Sakai Sambayan</i> dalam Masyarakat Adat Lampung	Komunitas, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya	Vol.7 No.2 /2001
2	Analisis Sosiologis terhadap Aliran Legisme Hukum di Indonesia	Sosiologi, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya	Vol.6 No.1 /2004
3	Karakter Budaya Politik Lampung (2016)	Kajian Ilmiah Politik Lokal	-
4	Strategi Dan Pendekatan Nilai Kearifan Lokal Lampung Dalam Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban masyarakat Desa	Sosiologi, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya	-

F. Pemakalah Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Tidak ada		

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	SOSIOLOGI Skematika Teori dan Terapan	1994, 2002, 2004, 2007	214	PT. Bumi Aksara, Jakarta
2.	MASYARAKAT, Dinamika Kelompok dan Implikasi Kebudayaan Dalam Pembangunan	2006, 2008.	161	Unila Press, Bandar Lampung

3.	Sistem Sosial Budaya Indonesia	2011	139	Unila Press, Bandar Lampung
4.	SOSIOLOGI HUKUM	2012	120	Unila Press, Bandar Lampung

H. Perolehan HKI Dalam 5-10 Terakhir

No	Tahun	Judul /Tema HKI	Jenis	Nomo P/ID
1.	1995	Sosiologi dan Perubahan Masyarakat	Hak Cipta (<i>Copyrights</i>) Buku Teks (UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002)	PJ.726.01.95 / ISBN.979-419-164-7
2.	2001	SOSIOLOGI, Skematka, Teori dan Terapan	Hak Cipta (<i>Copyrights</i>) Buku Teks (UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002)	BA.01-52.0242 / ISBN.979-526-179-7

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul /Tema/Jenis rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	Strategi Pengendalian Kerawanan Kamtibmas dalam Perspektif Sosio-kultural.	2011	Di Jabung Lamtim, dalam rangka memberikan masukan kepada Direktorat Pembinaan Masyarakat, Kepolisian Negara RI. Daerah Lampung	Baik
2.	Strategi Pemberdayaan Masyarakat	2011	Di Kepolisian Negara RI. Daerah Lampung Dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Lampung	Baik

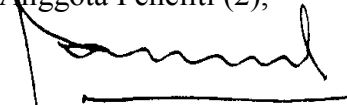
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Tidak ada		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **Penelitian DIPA FISIP Universitas Lampung** tahun 2018.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2018
Anggota Peneliti (2),



Dr. Abdul Syani, M.IP.
NIP. 19570704198503 1 025

BIODATA ANGGOTA PENELITI (3)

A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Drs. Pairul Syah, M.H.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
4	NIP	196310121994031002
5	NIDN	0012106304
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 12 Oktober 1963
7	Alamat Rumah	Jl. Abdul Muis, Gang Pelangi No. 3 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	(0721) 771751/08117238000
9	Alamat Kantor	Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	(0721)704626
11	Alamat e-mail	pairulsyah.1963@fisip.unila.ac.id
13	Mata Kuliah yang diampu	6. Sosiologi Hukum 7. Sosiologi Kriminalitas 8. Pengantar Ilmu Hukum 9. Sistem Sosial Budaya Indonesia 10. Sosiometri dan Dinamika Kelompok 11. Pendidikan Kewarganegaraan 12. Perencanaan Kota dan Daerah

B. Pengalaman Penelitian Dalam 7 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2010	Efektifitas Penanggulangan Anak Jalanan	Dipa Fisip Unila	5
2	2011	Prostitusi dan Upaya Penanggulangannya	Dipa Fisip Unila	5
3	2012	Bentuk Kebijakan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Badan Narkotika Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	5
4	2013	Potret Budaya Masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	6

5	2014	Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Hubungan Seksual di Luar Nikah di Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	6
6	2015	Integrasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi (Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)	Dipa Fisip Unila	6
7	2015	Pemantapan Status Keekerabatan dalam Prosesi Adat Angkon Muwakhi Pasca Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Adat Saibatin Marga Legun, di Wilayah Kebandaran Kesugihan Kalianda Lampung Selatan	Dipa BLU Unila	11
8	2016	Konflik antara Etnik Pendetang dan Penduduk Lokal (Studi Fenomenologi: Prilaku Komunikasi Pra dan Pasca Penyerangan Etnik Lampung terhadap Etnik Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan).	Dipa BLU Unila	15
9	2016	Tanggapan Masyarakat Penerima Raski Terhadap Pelaksanaan Distribusi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)	Dipa Fisip Unila	6
10	2017	Analisis Peranan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran Di Provinsi Lampung	Dipa Fisip Unila	7
11	2017	Analisis Perilaku Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)	Dipa Fisip Unila	7

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 6 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2012	Pelatihan Penulisan dan Pembuatan Bahan Ajar Responden Gender bagi Guru Sekolah Menengah Pertama	Dipa Fisip Unila	5
2	2012	Sosialisasi Pengembangan Bahan Ajar Sosiologi bagi Guru SMU, SMK dan MA di Kota Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	5
3	2013	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan tentang Hutan Tanaman Rakyat di Tiga Desa di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5
4	2013	Penyuluhan Tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja	Dipa Fisip Unila	5
5	2014	Penyuluhan Tentang Peranan Orang Tua dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5
6	2015	Upaya Peningkatan Perekonomian dengan Menumbuhkan Kesadaran Berwirausaha pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5
7	2016	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5
8	2017	Penyuluhan Tentang Pemantapan Etika Mahasiswa Di Lingkungan Kampus Pada Mahasiswa Baru Fisip Unila	Dipa Fisip Unila	8

D. Pengalaman dalam Penulisan Buku Ajar dalam 5 Tahun Terakhir

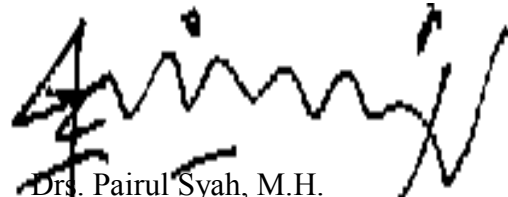
No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2010	Sistem Sosial Budaya Indonesia	139	Unila
2	2011	Sosiologi Kriminalitas	159	Unila
4	2013	Sosiologi Hukum	153	Unila
5	2014	Pengantar Ilmu Hukum	120	Unila

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **Penelitian DIPA FISIP Universitas Lampung** tahun 2018.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2018

Peneliti 3,



Dr. Pairul Syah, M.H.
NIP 196310121994031002

BIODATA ANGGOTA PENELITI (4)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (gelar)	Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A.
2	Jabatan Fungsional	Dosen Kontrak
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK	231801870116101
5	NIDN	-
6	Tempat Tanggal Lahir	Bandung, 16 Januari 1987
7	Alamat Rumah	Jl. Kawaluyaan Indah XII No. 7-9 RT 001 RW 004, Bandung, 40286, Indonesia
8	No.Telp/Hp	085624125583
9	Alamat Kantor	Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145
10	No. Telp/Fax	(0721) 786766
11	Alamat e-mail	fuad.abdulgani87@gmail.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= - orang S2= - orang S3= - orang
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Teori Sosiologi Klasik
		2. Struktur Sosial
		3. Metode Penelitian Kualitatif
		4. Manajemen Konflik

B. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3
Nama PT	Universitas Padjadjaran	Universitas Gadjah Mada	
Bidang Ilmu	Antropologi	Antropologi	

Thn Masuk	2006	2013	
Thn Lulus	2012	2017	
Judul Skripsi Tesis Disertasi	Cerita Budug Basu: Mitos di Komuniti Nelayan Cirebon	Satu Wajah Dua Rupa: Inkorporasi dan Diferensiasi Sosial Petani Dataran Tinggi Wadaslintang, Jawa Tengah	
Nama Pembimbing Skripsi dan Tesis	Rini. S. Soemarwoto, Ph.D. & Dr. Budi Rajab	Laksmi A. Savitri, Ph.D.	

C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2017	Studi Kondisi Lingkungan dan Sosial Komunitas di Wilayah Hulu Sungai Cikapundung, Bandung	Konfederasi Anti-Pemiskinan, Sakola Cikapundung, dan The Lodge	Rp. 8.000.000
2	2017	<i>Developing food security and green economy with sago on peatland in West Papua</i>	New Zealand Aid Programme	Rp. 30.000.000
3	2015-2016	Studi Marjinalitas dan Kerentanan (di bawah riset payung Ketika `Desa Membangun` dan `Membangun Desa` Direncanakan di Wonosobo: Mencari Suara Marjinal dalam Transformasi Desa)	Universitas Gadjah Mada (Beasiswa Tesis)	Rp. 8.500.000
4	2015	Studi Migrasi Sirkuler orang Gunung Kidul di Yogyakarta	Mandiri	Rp. 3.000.000
5	2015	Studi Teknologi dan Kesempatan Kerja	Yayasan Akatiga	Rp. 11.000.000
6	2013	Monitoring & Evaluasi Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) & Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)	TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) & Bank Dunia	Rp. 25.000.000

7	2012-2013	Sistem Produksi Minyak Kelapa Sawit dan Skema Kontrak antara Perusahaan dan Petani di Indonesia	CIFOR	Rp. 8.000.000
---	-----------	---	-------	---------------

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan
			Sumber
1	-		

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No
1	-			
2				

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terakhir

No.	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1.	Simposium internasional Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA)	Peran Keraton dalam Tradisi Pernaskahan Nusantara	11 – 13 September 2012	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

G. Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Kontributor artikel: (judul) <i>Pulang Aleyo: Melacak Jejak Migrasi Orang Maluku Lewat Lagu Rakyat</i> Dalam bunga rampai “Migrasi, Politik, dan Etnisitas” (penyunting Riwanto Tirtosudarmo)	2017	260	Kentja Press
2	Kontributor artikel: (judul) Marx dalam Antropologi Lévi-Strauss Dalam bunga rampai “Pengantar Pemikiran Tokoh-tokoh Antropologi Marxis” (ed. Dede Mulyanto & Stanley Khu)	2012	242	Marjin Kiri

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 5 tahun terakhir

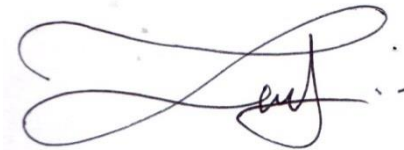
No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
1.	-			

J. Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi	Tahun
1.	-		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **Penelitian DIPA FISIP Unila** tahun 2018.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2018
Anggota Peneliti (4),



Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A.
NIK 231801870116101